



LAMPIRAN



UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 1949)

SEKOLAH PASCASARJANA
School of Graduate Studies

Jl. Harsono RM No.1 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, Telp: +6221 7824277, Fax: +6221 7824277, Website: www.unas.ac.id Email : sps@unas.ac.id

Jakarta, 2 Juni 2022

Nomor : 79 /MIA/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Kabupaten Bandung

Dengan hormat,

Kami perkenalkan mahasiswa kami di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hardianto HN
N. P.M : 206301718045
Tempat/ Tgl. Lahir : Bone/16-11-1995
Alamat Domisili : Jalan Empang Tiga Nomor 9, Pejaten Timur,
Passar Minggu, Jakarta Selatan
Hp. 081283347045

Mahasiswa tersebut saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis sebagai salah satu syarat wajib untuk menempuh ujian tesis Pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (MIA) Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.

Sehubungan dengan hal itu kami mohon perkenan Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepadanya untuk dapat melakukan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul tesis :

Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2021

Selanjutnya, mengenai peraturan/prosedur yang berlaku yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut sepenuhnya kami serahkan pada kebijaksanaan Bapak/Ibu.

Demikian, atas perhatian dan ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Ketua Prodi MIA,

Dr. Rusman Ghazali, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP/FAX. (022) 5891580 SOREANG 40912
eMail : badankesbangpol@bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 483 / Bid. Wasbang

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
2. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sesuai LevelKewaspadaan Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
4. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- b. Menimbang : Surat dari UNIVERSITAS NASIONAL, Nomor: 79/MIA/VI/2022, Tanggal 02 Juni 2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : **HARDIANTO HN**
- Alamat Kampus : **JL. Harsono RM No. 1 Ragunan Jakarta**
- No. Telpon/HP : **081283347045**
- Untuk : 1. Melaksanakan Kegiatan Penelitian untuk Penyusunan Tesis dengan Judul: **"Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2021"**
2. Lokasi/Instansi : **BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung**
3. Waktu Kegiatan : **07 Juni 2022 s/d 07 September 2022**
4. Status : **Baru**
5. Penanggungjawab : **Dr. Rusman Ghazali, M.Si**
- Melaporkan hasil kegiatan kepada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung** paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan.
- Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama Melaksanakan kegiatan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengikuti ketentuan **Protokol Kesehatan Covid-19** yaitu :
 - Wajib menggunakan masker dalam setiap pelaksanaan kegiatan
 - Selalu mencuci tangan dengan memakai sabun/hand sanitizer
 - Wajib Menjaga jarak (minimal 1 – 1,5 m). Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Soreang, 07 Juni 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



• **HASIL PEROLEHAN DATA PRIMER**

Pedoman Wawancara	Informan	Jawaban
<p>1. Bagaimana bentuk kebijakan penanganan stunting yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bandung, apakah kebijakan yang dilaksanakan hanya dilakukan oleh dinkes saja?</p>	<p>Nicola sandhy Tuerah Santoso</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuat suatu kebijakan dalam upaya percepatan penurunan Stunting yaitu Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten dimana dalam Tim tersebut beranggotakan Dinas-Dinas yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Bandung. Dan dalam Tim tersebut tiap Dinas memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Tidak hanya Unsur Pemerintahan yang Masuk kedalam Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung terdapat juga dari unsur pemerintahan dan Institusi yang bergabung kedalam Tim. Diharapkan dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung Upaya untuk</p>

		<p>penanganan Stunting dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.</p>
	<p>Dwi Yudha</p>	<p>Bentuk kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Bandung berupa terbitnya Perbup No 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.</p> <p>Semua Perangkat Daerah yang terkait dalam kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting mempunyai peran masing – masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tahun lalu sektor kesehatan mempunyai peran yang cukup besar, hal ini dikarenakan: 1) data utama terkait stunting ada di Dinas Kesehatan; 2) Kementerian Kesehatan mengalokasikan dana dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting melalui dana BOK stunting untuk Kabupaten/Kota sementara perangkat daerah lainnya belum mendapatkan</p>

		<p>dana khusus untuk percepatan penurunan stunting. Dana BOK Stunting tersebut digunakan untuk mengakomodir kegiatan aksi konvergensi stunting; 3) Mindset sebagian besar masyarakat termasuk perangkat daerah yang berfikir masalah gizi/kesehatan disebabkan oleh faktor gizi/kesehatan sehingga harus diselesaikan oleh sektor kesehatan.</p>
	<p>Dewi Sulamdari</p>	<p>Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kab. Bandung.</p> <p>Perbup No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.</p>
	<p>Mirwan Rahmadi yusuf</p>	<p>Implementasi dari Perbup No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa telah diterbitkan peraturan Desa</p>

		<p>sebagai turunan dari kebijakan kabupaten untuk upaya penurunan stunting dimana pelaksanaan penurunan stunting dilakukan secara Bersama-sama antara tenaga Kesehatan Puskesmas dan pihak desa serta PKK untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan memberikan informasi sasaran yang berhak mendapatkan program agar tepat sasaran.</p>
	<p>Imam Al Mutaqqim</p>	<p>Kab. Bandung sebagai salah satu kabupaten prioritas percepatan penurunan stunting telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti dalam peraturan bupati tentang kewenangan desa mendorong adanya intervensi yang dapat dilakukan oleh desa dalam penurunan stunting.</p> <p>Selain itu Kab. Bandung telah menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan stunting, sehingga dengan RAD ini menjadi</p>

		<p>dasar bagi pemerintahan daerah dalam menyusun rencana kegiatan/program.</p> <p>Kebijakan yang dilakukan tidak hanya oleh Dinkes yang lebih mengalokasikan kegiatannya untuk intervensi spesifik, tetapi juga dari OPD lain missal Dikbud, Perkim, Dinsos, dll juga menyusun kegiatan/program terkait intervensi sensitif.</p> <p>Selain itu Pemda Kab. Bandung telah menerbitkan Peraturan Bupati Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting</p>
	Adriyanto	<p>Sebelumnya pelaksanaan stunting hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan namun untuk saat sekarang kebijakan penanganan stunting telah dilakukan secara Bersama/ multi sector dimana peran masing masing OPD berperan</p>

		aktif terutama pasca di terbitkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
	Yuyud Wahyudi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak hanya Dinas Kesehatan, namun melibatkan OPD lainnya juga, diantaranya: - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pu / Cipta Karya - Dinas Sosial - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
2. Program apa yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanganan stunting?	Nico	Salah Satu kegiatan awal untuk pelaksanaan program penanganan stunting yang telah dilaksanakan adalah kegiatan Rembug Stunting dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemaparan terkait Issu-issu terkait stunting di kabupaten bandung, Analisis situasi kejadian Stunting di kabupaten Bandung Serta Program/

		<p>Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di tiap Dinas. Serta dalam kegiatan tersebut dibuat komitmen bersama untuk bersama-sama untuk menjalankan program percepatan penurunan stunting di kabupaten bandung.</p>
	<p>Dwi Yudha</p>	<p>Penanganan stunting dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang tersedia di OPD masing - msing. Perangkat daerah dari berbagai sektor masih terkendala dengan penganggaran khusus untuk stunting. Hal ini disebabkan belum adanya anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk program percepatan penurunan stunting. Sebagian besar anggaran dari perangkat daerah masih digunakan untuk melakukan kegiatan dalam skala kabupaten belum terfokus pada desa lokus intervensi stunting.</p>

	Dewi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan layanan Kesehatan Ibu bersalin - Pengelolaan kesehatan ibu hamil - Pengelolaan kesehatan balita - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar - Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kerisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana
	Mirwan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan posyandu dilakukan secara rutin setiap bulan walaupun pada masa pandemi tim puskesmas melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk melakukan penimbangan dan diberikan informasi tentang status balita sehingga warga mengetahui secara dini jika terindikasi stunting. - Adanya aplikasi Aksi Cegah Stunting (ACS) dari Universitas Telkom yang bekerjasama dengan bidan Desa yang

		<p>memudahkan dalam melakukan pemantauan balita stunting di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian paket makanan sehat kepada warga yang dilakukan oleh tim BKKBN terutama pada balita - Adanya bantuan pembangunan sanitasi komunal diberikan oleh dinas cipta karya dan penyuluhan melalui pemicuan stbm - Adanya pemberian bantuan langsung berupa tunai dan sembako dari dinas social - Adanya pelatihan untuk tim kader dalam pemberian makan anak dan bayi serta adanya program PAUD dapat melakukan stimulasi pada anak dibawah usia dini - Adanya forum kabupaten bandung sehat yang bergerak dalam bidang sanitasi untuk mendorong Desa bebas buang air besar sembarangan - Pemanfaatan lahan untuk ditanami dengan pangan berbasis lokal yang
--	---	--

		<p>mengandung gizi seimbang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampanye pencegahan stunting sampai ke tingkat RW
	<p>Imam</p>	<p>Kegiatan/program yg dilakukan cukup variatif baik intervensi spesifik maupun sensitif baik yang dilakukan oleh OPD maupun oleh Desa.</p> <p>Misal untuk kegiatan yang dilakukan oleh OPD adalah Intervensi kesehatan lingkungan dalam penanganan stunting melalui peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pondok pesantren, Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga</p>

		Miskin, Penguatan peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan, Kegiatan intervensi daerah rawan pangan, dll
	Adriyanto	Program kegiatan saat ini sudah sangat variative walau belum massif dan nilai dari kegiatan masih kecil dari OPD, sudah mensasar intervensi spesifik dan sensitive.
	Yuyud	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi TTD disertai dengan monitoring evaluasi kepatuhan dalam mengkonsumsi TTD dengan LP/LS - Pendampingan Calon Pengantin di Desa - Orientasi PMB bagi tenaga kesehatan; Edukasi tentang ASI eksklusif melalui penyuluhan dan koseling - Orientasi tatalaksana gizi buruk bagi petugas kesehatan - pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita oleh tenaga kesehatan terlatih di posyandu

		<p>dan puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian PMT-P berbasis pangan lokal - Defaulter Tracking Data Imunisasi Dasar Lengkap (Idl), Uci Desa Dan Vaksinasi Covid-19 Oleh Puskesmas (Survim); "- Pertemuan Program Imunisasi Dalam Peningkatan Cakupan Idl - Verifikasi desa/kecamatan SBS dalam rangka percepatan Kabupaten SBS. - Evaluasi pelaksanaan Perbup PHBS - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Satu Daerah - Pembinaan Pencatatan Pelaporan Pelayanan KB Oleh TPD - Pencanaan Dapur Sehat Atasi Stunting, Pembinaan TPD dan Pos KB - Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal - Pengelolaan dan Pengembangan
--	--	--

		<p>Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Harapan - Jaminan Kesehatan Nasional PBI - Rembuk stunting tk kabupaten; - Rembuk stunting tk kecamatan; - Monev rembuk stunting kecamatan - Evaluasi dan Monitoring Percepatan Penurunan Stunting - Kampanye STBM dan institusi pendidikan/Pontren - Pendampingan penerapan STBM - Pertemuan Koordinasi Lintas Program Pelaksanaan Surveilans Gizi - Pertemuan koordinasi dalam rangka percepatan desa SBS - Pembinaan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintah Desa - Peningkatan Kapasitas Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
--	---	---

		<p>Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pendampingan penyusunan sasaran kegiatan dana desa dalam upaya konvergensi percepatan penurunan stunting - Pembinaan dan Pendampingan Desa Bebas Stunting - Pembinaan dan Pendampingan Desa berkinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting - Pembelanjaan Dana BOP PAUD untuk komponen PMT, Parenting dan DDTK - Bimtek Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD - Operasional Surveillance Stunting Tingkat Desa (Paket Data untuk Pelaporan) - Kegiatan Pemilihan Duta GenRe dan Pertemuan Forum PIK-R - Rapat Pengelola Poktan BKB dan
--	--	---

		BKL
<p>3. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam upaya penurunan stunting Kabupaten Bandung?</p>	<p>Nico</p>	<p>Faktor Pendorong:</p> <p>Faktor yang menjadi pendorong agar upaya penurunan stunting di Kabupaten Bandung adalah salah satunya mengingat angka prevalensi Stunting di kabupaten bandung yang tinggi yaitu 31,1% berdasarkan data SSGI dan dimana kabupaten bandung menjadi wilayah ke 4 yang memiliki Prevalensi Stunting yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Tentunya hal tersebut menjadi pendorong untuk pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung agar dapat mengejar Target Nasional Stunting yaitu 14% pada Tahun 2024.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah dari Jumlah SDM yang kurang dan Kurang Terlatih</p>

		di lapangan. Sehingga terhambat dalam upaya pemenuhan Data.
	Dwi Yudha	<p>Fator Pendorong:</p> <p>Jumlah penduduk yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi faktor pendorong pencegahan dan percepatan penurunan stunting.</p> <p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dari kepala daerah dan pimpinan PD; - Mindset bahwa faktor keturunan menjadi faktor terbesar terjadinya stunting; - Stunting adalah masalah kesehatan sehingga yang “bertanggungjawab” menangani masalah tersebut adalah sektor Kesehatan; - Kondisi lingkungan: Sanitasi dan akses air bersih; - Pengetahuan orangtua/pengasuh tentang stunting; - Pola asuh dan pola makan terutama

		pada bayi dan anak balita,
	Dewi	Upaya percepatan penurunan stunting sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui program kegiatan yang ada di lintas OPD, bersumber dana ABBN, APBD, APBDes. Melalui Dinas Kesehatan, semua desa sudah mendeklarasikan ODF. Hambatannya adalah koordinasi dan sinergitas dari lintas OPD masih perlu ditingkatkan, pergantian / mutasi ASN yang berkaitan kegiatan stunting tidak berkesinambungan informasinya.
	Mirwan	Faktor Pendorong: <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya layanan posyandu yang memudahkan akses warga dalam melakukan pemantauan pertumbuhan. - Adanya edukasi dari berbagai pihak terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting yang bisa dilakukan di tingkat keluarga - Adanya bantuan sarana dan prasarana seperti air bersih, sanitasi, serta

		<p>bantuan langsung yang diberikan pemerintah daerah kabupaten bandung dalam upaya pencegahan stunting</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran orang tua dalam membawa anaknya ke layanan Kesehatan rendah sehingga dalam menemukan kasus stunting sedikit menyulitkan. - Masih rendahnya pengetahuan ibu terutama dipengaruhi tingkat Pendidikan serta budaya dalam pola asuh. - Masih adanya perilaku buang air besar sembarangan terutama di wilayah dekat dengan sungai dan kebun hal ini dikarnakan kebiasaan masyarakat sehingga menyebabkan kasus penyakit berbasis lingkungan tinggi
	<p>Imam</p>	<p>Faktor Pendorong:</p> <p>Terbitnya Peraturan Bupati Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan</p>

		<p>Stunting menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting.</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Belum semua OPD memahami tugasnya dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, seolah-olah masalah stunting masih menjadi urusan kesehatan.</p> <p>Selain itu polah hidup masyarakat belum mendukung upaya penurunan stunting. Misal masih ada masyarakat yang memanfaatkan tenaga non medis (paraji) untuk persalinan.</p> <p>Penghambat lain adalah seringnya personil yang berganti</p>
	Adriyanto	<p>Faktor Pendorong :</p> <p>stuning merupakan program nasional hingga daerah yang wajib di jalankan, angka stunting yang masih tinggi</p> <p>Factor penghambat :</p> <p>koordinasi lintas sector yang belum</p>

		optimal, anggaran kegiatan penanganan stunting yang masih kecil.
	Yuyud	<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat SDM yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan intervensi diantaranya KPM dan Tim Pendamping Keluarga (baru dibentuk) <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber data dalam mendukung kebijakan masih dari berbagai sumber, belum satu sumber data.
4. Apa yang diperlukan dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di kabupaten bandung?	Bapak Nico	Dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di kabupaten bandung hal yang pertama adalah komitmen bersama pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama melakukan upaya percepatan penanganan stunting.
	Dwi Yudha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Dari Kepala Daerah Dan Pimpinan Perangkat Daerah Terkait; 2. Kepedulian dari seluruh komponen masyarakat; 3. Keberpihakan anggaran untuk

		percepatan penurunan stunting;
	Dewi	Kebijakan percepatan penurunan stunting harus disesuaikan dengan kebijakan dalam Perpres 72 Tahun 2021, dimana perlu diatur pembagian peran para pihak dan target capaian per tahun, pembinaan kepada pemerintah desa & masyarakat, publikasi data stunting dan audit stunting
	Mirwan	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk forum komunikasi antar OPD dalam upaya percepatan penurunan stunting - Perlu adanya upaya peningkatan kualitas data sasaran sehingga dalam menentukan program agar lebih tepat, efektif dan efisien.
	Imam	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi massif kepada semua pihak tentang stunting dan siapa saja yang harus berperan dalam penurunan stunting. - Adanya kebijakan dari pusat terkait penetapan minimal alokasi anggaran stunting

	Adriyanto	Komitmen daerah, Regulasi daerah, anggaran penanganan stunting, dukungan lintas sector, inovasi daerah dalam penanganan stunting.
	Yuyud	<ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi berbagai system pendataan (e_PPGBM, e_HDW, Elsimil, dll) untuk mendapatkan satu data yang tervalidasi tidak menimbulkan multitafsir dan memudahkan dalam pengambilan kebijakan. - Meningkatkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk memastikan layanan di desa dengan mendapatkan peningkatan kapasitas melalui OPD - Mengoptimalkan peran actor non pemerintah untuk terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Misal: <ol style="list-style-type: none"> 1.) Dana CSR lebih banyak dialokasikan untuk penanganan stunting. 2.) Kampanye pencegahan stunting dimasukan di lingkungan

		(area) industri.
5. Bagaimana Koordinasi Lintas sektor dan Lintas program dalam upaya pencegahan stunting?	Bapak Nico	Koordinasi lintas sektor yang telah dilaksanakan adalah dilakukan rapat koordinasi dimana didalam rapat tersebut menghadirkan Dinas-Dinas di dalam pemerintahan kabupaten bandung yang Termasuk Kedalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung. Dalam Rapat tersebut membahas terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk upaya percepatan penurunan stunting di tiap Dinas serta evaluasi hasil kegiatan dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten bandung.
	Dwi Yudha	Koordinasi Lintas sektor dan Lintas program dalam upaya pencegahan <i>stunting</i> perlu ditingkatkan lagi tidak perlu ada ego sectoral dan ego program atau mindset bahwa pencegahan stunting menjadi tanggung jawab satu

		<p>sektor saja.</p> <p>Koordinasi harus dimulai dari tingkat atas hingga ke bawah secara berjenjang, dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan.</p>
	<p>Dewi</p>	<p>Dengan telah terbentuknya TPPS Kabupaten , perlu ada peningkatan koordinasi antar lintas sektor , dimana telah ada bidang-bidang yang bertanggungjawab. Bappeda tetap mempunyai peran penting dalam mengkordinsikan lintas sektor dan lintas program percepatan penurunan stunting. Anggaran APBD yang terbatas perlu di suport oleh sumber dana lain dari non pemerintah, perlu digali CSR , lembaga kemasyarakatan atau pihak lain yang dapat mensupport program kegiatan kepada sasaran dari remaja , PUS, calon pengantin, Ibu Hamil, bayi, balita.</p>

	Mirwan	<p>Koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam upaya penurunan stunting melalui tim TPPS Kabupaten Bandung yang saat ini masih berupaya dalam melakukan upaya konvergensi dengan cara melibatkan banyak pihak sampai dapat memastikan output program</p>
	Imam	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sector dan lintas program dalam upaya penurunan stunting telah dilakukan pertemuan koordinasi untuk menyamakan persepsi antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan. - Dalam pertemuan tersebut menginformasikan bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dilakukan melalui penguatan peran lintas sector dan lintas program, meningkatkan pemahaman, mengidentifikasi kendala dan mendiskusikan rencana kerja tindak lanjut koordinasi antar perangkat

		<p>daerah</p> <p>- Selain rencana kerja untuk percepatan penurunan stunting, pembahasan juga dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan tiap perangkat daerah.</p>
	Adriyanto	<p>Koordinasi lintas sector masih kurang maksimal berjalan dikarenakan hanya berjalan pada beberapa OPD dan dukungan lintas program dalam penanganan stunting belum secara massif di seluruh kabupaten bandung.</p>
	Yuyud	<p>Baik. Dengan diterbitkannya SK Bupati mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mempertegas keterlibatan lintas sektor.</p>
6. Bagaimana upaya yang dilakukan agar perilaku masyarakat dapat sejalan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting?	Bapak Nico	<p>Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Stunting, dan dampak buruk dari stunting agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya pencegahan stunting. Serta dilakukan pendekatan pada tokoh masyarakat dimana tokoh masyarakat</p>

		<p>sangat berperan penting untuk membawa masyarakat agar dapat ikut serta dalam program pencegahan dan penurunan stunting.</p>
	Dwi yudha	<p>Selalu mengedukasi masyarakat tentang stunting melalui berbagai media yang dapat diakses oleh berbagai kalangan baik secara langsung atau pun tidak langsung. Merubah pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa stunting adalah faktor keturunan, sehingga menjadi faktor yang tidak bisa diperbaiki lagi.</p>
	Dewi	<p>Merubah perilaku masyarakat tidak lah mudah, perlu keterlibatan tidak hanya dari penyedia layanan tetapi dukungan pemberdayaan masyarakat melalui dukungan pemerintah desa, kegiatan posyandu, PAUD, BKB, PKK, dan lainnya serta memaksimalkan pelaku-pelaku di desa dari Kader Posyandu, Kader PKK, Guru PAUD, TPK, KPM,</p>

		<p>dll.</p> <p>Konsep yang disampaikan ke masyarakat perlu dirancang agar lebih menarik, lebih mudah dipahami, lebih mudah diimplementasikan oleh masyarakat.</p>
	Mirwan	<p>Adanya kampanye secara massif untuk upaya penurunan stunting di tingkatan masyarakat dan adanya komunikasi perubahan perilaku yang dilakukan oleh tim secara terus menerus serta dilakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku.</p>
	Imam	<p>- Secara umum koordinasi LS/LP telah berjalan, tetapi belum efektif hal ini disebabkan adanya pemahaman masalah stunting hanya menjadi urusan kesehatan.</p> <p>- Dukungan anggaran koordinasi/operasional tetap dialokasikan oleh pusat sebagai pendorong inisiatif daerah dalam</p>

		<p>mengalokasikan anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sosialisasi dan gerakan bersama semua pihak dalam mendukung pelaksanaan intervensi kegiatan penurunan stunting. - Peran tokoh masyarakat/agama dan lainnya untuk bersama-sama mendorong perubahan perilaku masyarakat
	Adriyanto	<p>Pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makan sehat dan bergizi bagi calon pengantin, ibu hamil dan bayi balita, melakukan konsultasi dan pengobatan pada pusat layanan yang tersedia untuk pemeriksaan kesehatan.</p>
	Yuyud	<p>Strategi komunikasi dalam kampanye penurunan stunting harus sesuai dengan segmentasi sasaran pencegahan stunting sebagai audiensnya.</p> <p>Bahasa, visual, media dan waktu penyampaian harus tepat.</p>

- **DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN**



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jkqh.uniqhba.ac.id Internet Source	5%
2	bengkaung.desa.id Internet Source	4%
3	www.scribd.com Internet Source	3%
4	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
5	ejournalwiraraja.com Internet Source	2%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	artikel.ubl.ac.id Internet Source	1%
9	stunting.go.id Internet Source	1%

10

bappeda.bangka.go.id

Internet Source

1 %

11

es.scribd.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

